

## **ABSTRAK**

Permasalahan jual beli dengan sistem pembayaran tertunda menjadi fenomena yang umum di masyarakat, terutama dalam transaksi kebutuhan pokok seperti tabung gas LPG 3 kg. Di Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, praktik ini dilakukan antara sub pangkalan dan konsumen dengan sistem pembayaran yang tidak langsung, bahkan tanpa adanya pencatatan atau dokumen tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut berlangsung serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan akad, keadilan, dan amanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan penjual (sub pangkalan) dan beberapa konsumen yang melakukan transaksi dengan sistem pembayaran tertunda. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur keislaman, kitab fikih muamalah, serta dokumen penunjang lain yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tabung gas LPG 3 kg di sub pangkalan Mak Gining dilakukan dengan dua metode pembayaran, yaitu tunai dan tertunda. Pembayaran tertunda hanya diberikan kepada konsumen yang dikenal baik dan dianggap amanah. Akad dilakukan secara lisan dan berdasarkan asas saling percaya tanpa bukti tertulis. Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik ini dibolehkan selama memenuhi prinsip kerelaan dan kejujuran, namun terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan akad dan dokumentasi. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem administrasi untuk menjaga keadilan serta menghindari kemungkinan terjadinya sengketa atau kerugian.

Kata kunci: jual beli, akad tertunda, fikih muamalah

## ABSTRACT

*The issue of deferred payment transactions is a common phenomenon in society, especially in the sale of essential commodities such as 3-kg LPG gas cylinders. In Dungus Village, Cerme District, Gresik Regency, this practice is carried out between sub distributors and consumers through a system of postponed payment without written agreements. This research aims to analyze the actual practice of such sales and assess their compliance with Islamic commercial law, particularly the principles of contract clarity, justice, and trustworthiness.*

*This study applies a qualitative method using field research with a normative empirical approach. Primary data were collected through interviews with the seller (sub distributor) and several consumers who engage in deferred payment transactions. Secondary data were gathered from Islamic legal literature, classical fiqh texts, and other relevant documents. Data were analyzed descriptively using three steps: data reduction, data display, and conclusion drawing.*

*The findings show that the sale of 3 kg LPG gas cylinders at Mak Gining's shop is carried out using two payment methods: cash and deferred. Deferred payment is only allowed for trusted and regular customers. Contracts are made verbally and based on mutual trust, without any written documentation. According to fiqh muamalah, such a practice is generally permissible if based on mutual consent and honesty. However, weaknesses are found in the clarity and documentation of the contract, which may lead to disputes or financial harm. Therefore, improvements in administrative aspects are necessary to ensure justice and to protect the rights of both parties.*

*Keywords: deferred sale, LPG transaction, Islamic law*